

PARTAI BARU DAN ORANG BARU, ANALISIS KIPRAH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA BALI PERSPEKTIF RANDALL DAN SVASAND

I Gede Wega Prastama¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Gede Indra Pramana³⁾

¹²³⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: igedewegaprastama@unud.ac.id¹⁾, piersandreasnoak@unud.ac.id²⁾, indraprama@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The Indonesian Solidarity Party, especially in the Province of Bali, succeeded in bringing three of its cadres to DPRD seats in the 2019 legislative elections so as to make the author interested in researching and analyzing how the new political party works from 2015-2020 according to Randall and Svasand's perspective level of Regional Leadership Council of Bali Province. To understand the problem, the study used descriptive qualitative methods that relied on a combination of secondary information from various sources and primary data from observations, as well as in-depth interviews of informants from the PSI board of Bali province and elected board members from PSI Bali province. After conducting research, researchers obtained the results that the gait of new political parties with new people could not be done briefly, although with new concepts or ways because there are many stages that must be done so that political parties are able to institutionalize.

Keywords: Institutionalization of Political Parties, DPW PSI Bali, Legislative Elections 2019

1. PENDAHULUAN

Partai bukanlah keperluan sehari-hari, partai akan diperlukan jika partai tersebut bisa memberikan sebuah peradaban baru tentang masadepan kehidupan sejahtera. Tanpa itu, partai hanya menjadi kelompok elite yang terputus dari kepentingan publik. Partai juga disebut wadah sosial politik yang sebisa mungkin harus memaksimalkan sumber daya miliknya agar tercapai visimisinya. Dalam sistem pemerintahan demokrasi partai politik memiliki fungsi sebagai perwakilan dari kepentingan publik melalui anggota anggotanya yang ada di DPR hasil dari pemilihan. Partai juga berperan dalam penentuan pemimpin di tingkat pusat maupun daerah. Pada level daerah, dengan sistem

pemilihan langsung legislatif di daerah partai politik menjadi wadah untuk mengusung calon legislatif yang akan berkontestasi pada pemilu legislatif. Dengan tugas dan fungsi tersebut, partai politik dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas organisasinya, melalui pembenahan secara internal maupun eksternal. Partai politik juga dianggap sebagai wadah untuk menyatukan orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama sehingga bisa mendominasi sebuah keputusan. Pada umumnya partai politik juga didefinisikan sebagai wadah yang terdiri dari aktor-aktor politik yang dijadikan tokoh di masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatian pada persoalan kekuasaan

pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dalam menempati jabatan-jabatan publik.

Partai politik memberikan ruang yang sangat besar bagi warga negara untuk mengikuti semua kegiatan politik. dari partai politik warga negara bisa membangun pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dan dapat berjuang untuk kepentingan umum serta menciptakan pemerintahan yang tidak otoriter. Dalam kaitannya sebagai institusi partai politik idealnya digunakan sebagai motor penggerak haluan massa, mewakili sebuah kepentingan, dan menjembatani sebuah diplomasi bagi pendapat yang salingbersaing sertamenyediakan sarana untuk membentuk pemimpin politik secara terstruktur.

Indonesia dengan sistem demokrasi tentu tidak terlepas dari peran penting yang dilakukan oleh partai politik dalam merealisasikan sistem politik. Di Indonesia ada berbagai partai politik yang sudah lama berkiprah di sistem politik Indonesia, baik di dalam struktur pemerintahan pusat maupun di dalam struktur pemerintahan daerah yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Bali. Dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru hadir di dalam sistem politik Indonesia yang secara resmi lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan satu-satunya partai politik yang lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM, dan ini berarti PSI berhak mengikuti Pemilu Legislatif Tahun 2019.

PSI sebagai partai baru di Pemilu Legislatif 2019 telah menampilkan perkembangannya dari segi anggota yang bisa dilihat pada tahun 2015 sampai 2020 yang anggotanya ada di

seluruh wilayah Indonesia. PSI yang menjadi partai baru menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan peneliti sangat ingin meneliti bagaimana partai baru dengan orang-orang baru ini membangun partainya dalam pemilu legislatif tahun 2019 khususnya di Provinsi Bali.

Bali adalah provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari keterkenalan PSI. Dari data di Dewan Pengurus Wilayah PSI Bali, tercatat dari 100 ribu yang mendaftar online ke website PSI, terdapat 55 ribu Kartu Tanda Anggota yangtelah diserahkan,itu artinya awal berdirinya PSI di Bali memiliki 55 ribu anggota. Adapun pemilik KartuPSI adalah penduduk Indonesia yang mempunyai hakmemilih dan dipilih (psi.id, 2019).

Studi ini mengkaji tentang bagaimana kiprah PSI Bali sebagai partai baru dengan orang baru tahun 2015-2020 perspektif Randall dan Svasand sehingga menjadi partai peringkat ke-4 perolehan suara serta memiliki satu kursi di DPRD Bali dan dua kursi di DPRD Denpasar. Tidak semua partai baru di Provinsi Bali memiliki *track record* yang menunjukkan kemajuan pelebagaan seperti PSI, contohnya Partai Perindo, Berkarya, dan Garuda yang sama sekali tidak mengalami perkembangan dari segi hasil yang didapatkan dari pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Bali.

Dari pemaparan diatas, penulis ingin melaksanakan penelitian lanjutan dalam bentuk skripsi berjudul: "Partai Baru dan Orang Baru, Analisis Kiprah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Bali Tahun 2015-2020 Perspektif Randall dan Svasand.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pelebagaan Partai Politik

Partai adalah wadah masyarakat suatu negara yang memiliki sistem politik demokrasi agar bisa menyuarakan suara-suara tentang pembangunan sebuah sistem yang ideal dimana didalamnya terdapat kelompok-kelompok yang memiliki arah yang sama. Setiap langkah partai politik pastinya selalu berusaha untuk hadir dan bekerja untuk masyarakat. Tetapi, partai politik sekarang lebih suka untuk hadir ketengah masyarakat pada saat mau pemilihan saja setelah itu rakyat tidak tahu apa yang dilakukan oleh partai. Dan ini menjadi kelemahan dari partai politik dalam melembagakan diri secara internal dan eksternal.

Huntington juga menjelaskan bahwa pelembagaan partai politik itu adalah proses organisatoris dalam prosesur untuk mencapai stabilitas dari nilai tertentu. Menurutnya, ada empat dimensi dari sistem pelembagaan partai politik yang dikembangkan lagi oleh *Mainwaring* dan *Torcal*, yaitu stabilitas kompetisi partai, jika kompetisi partai tidak disertai pelembagaan partai maka akan meningkatkan statistis polarisasi dalam pemilu. Selanjutnya citra yang matang di publik, dimana partai sudah ada basis pendukung utamayang tidak berganti pada pemilu. Ketiga adanya legitimasi aktor politik terhadap partai yang melihat bahwa partai adalah bagian penting dari demokrasi. Keempat, partai politik dianggap terlembaga jika bukan milik dari perseorangan.

Dari uraian yang dijelaskan sebelumnya, seperti dalam proses pelembagaan parpol harus dilakukan secara menyeluruh agar terjadi stabilitas dan pencapaian nilai yang diinginkan sebuah organisasi. Dalam

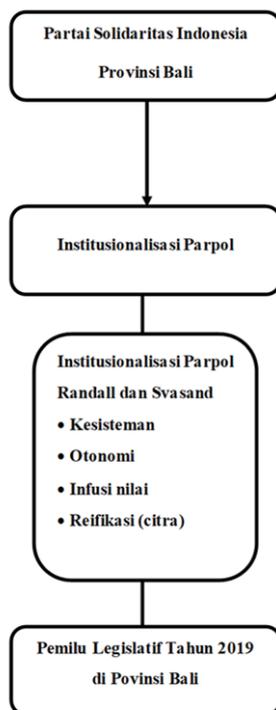
pelembagaan parpol tidak hanya ada di dalam, tetapi juga harus dilakukan keluar agar pemilih tetap memilih parpol tersebut.

Seangkan, *Guillermmo* menjelaskan ada dua dimensi yang ada pada pelembagaan parpol diantaranya nilai yang masuk dan keseharian yang dilakukan. Dari aspek nilai yang masuk dijelaskan bahwa anggota-anggota partai mengesampingkan pemikiran individualis menjadi pemikiran untuk memberi legitimasi sepenuhnya pada nilai-nilai parpol. Sementara itu, keseharian yang dilakukan partai harus memiliki struktur yang jelas dan tidak berubah-ubah, dimana peraturan partai yang baku dan tidak baku menjadi arah gerakan yang konsisten serta tidak berubah membuat pengurus dan publik secara menyeluruh dapat teringat terus pada nilai partai tersebut. Menurutnya, melakukan pelembagaan tersebut diatas tidak semudah yang dipikirkan, karena pastinya ada oknum-oknum elite politik yang menggunakan partai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sempit mereka. Hal ini juga diikuti oleh adanya faksi-faksi yang membuat partai akan sulit bergerak dengan banyaknya kepentingan di dalam, tanpa memandang aturan partai.

Randall dan Svasand juga memiliki pemahaman tentang lembaga partai dimana menurut mereka proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*the process by wich the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture*). Menurut mereka roses pelembagaan ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Apabila

kedua aspek ini dipersilangkan maka akan dihasilkan derajat/dimensi, yaitu (1) derajat kesisteman (*systemnes*) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural. (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Pemaparan dalam definisi institusionalisasi partai politik menampilkan beberapa argumen dari para ahli, tapi dalam menganalisis penelitian dan pembahasan akan lebih cenderung menggunakan perspektif pelembagaan partai politik menurut *Vicky Randall* dan *Lars Svasand*.



3. METODELOGI PENELITI

Kriteria Penelitian

Di penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah melalui penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tulisan lisan dari perilaku yang diamati. Seperti kata Nawawii (1991:63) meneliti secara deskriptif memecahkan masalahnya dengan melukiskan situasi subyek atau obyek berdasarkan fakta-fakta yang dilihat secara apa adanya.

Sumber Penelitian

Data dalam penelitian kualitatif adalah data disajikan dalam bentuk wawancara langsung dan tidak berupa rumus angka. Sedangkan, sumber data yang digunakan di jurnal ini sebagai berikut:

Data Utama

Data Utama adalah data yang langsung didapatkan dari sumbernya dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber yang dilakukan dengan dengan cara wawancara atau interview terhadap pihak-pihak yang terlibat. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pengurus DPW PSI Provinsi Bali dan DPD PSI Kota Denpasar. Penulis juga melaksanakan praktik langsung ke lapangan dan mengambil data yang berbentuk wawancara dengan Anggota Legislatif terpilih pada Pileg 2019 baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Bali khususnya Kota Denpasar.

Data Tambahan

Data tambahan penulis di penelitian ini adalah bukubuku reprints dan infor verba lain yang terkait pda masalahmasalah penelitin ini. Data tambahan digunakan mendukung informasi dari data utama yang diperoleh waktu wawancara. Adapun data pendukung yang penulis gunakan, diantaranya:

- 1) Buku dengan judul Political Order in Changing Societies yang ditulis oleh Samuel P. Huntington.
- 2) Buku ABC PSI yang menjadi arah seluruh kader disemua tingkatan, agar terwujud administrasi dan kerapihan organisasi yang baik.
- 3) AD/ART Partai Solidaritas Indonesia.
- 4) Jurnal Institusionalisasi Parpol yang berkaitan dengan studi ini, seperti jurnal dari *Vicky Randall dan Lars Svasand*.
- 5) Informasi dari website resmi Partai Solidaritas Indonesia mengenai pelebangaan PSI.
- 6) Berita dari website resmi KPU Provinsi Bali mengenai rekapitulasi suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali.
- 7) Berita dari SINDO NEWS mengenai Kerangka Institusionalisasi Parpol.
- 8) Artikel Suara KPU Provinsi Bali Edisi Pemilu 2019.

Tempat Analisis

Tempat analisis adalah wilayah yang diteliti oleh penulis. Tempat analisis ini akan membantu penulis dalam melakukan proses wawancara sebagai bahan untuk penyusunan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan unit analisis organisasi yang berfokus pada partai politik serta informan yang memahami permasalahan yang diteliti dan bisa memberikan uraian tentang

institusionalisasi (pelebangaan) yang dirasakan di dalam tubuh partai.

Teknik Penentuan Informan

Cara menentukan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan snowball. Teknik snowball merupakan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 3.4 Daftar Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Jabatan
1	I Nengah Yasa Adi Susanto	Ketua DPW PSI Bali
2	Cok Gd. Ngurah Duwi Satria W.	Wakil Ketua DPW PSI Bali
3	Desak Gede Maya Agrevina	Sekretaris DPW PSI Bali
4	Gede Eka Wijaya Patriana	Ketua DPD PSI Denpasar
6	Grace Anastasia Surya Widjaja	Anggota DPRD Provinsi Ba
7	Emiliana Sri Wahjuni	Anggota DPRD Kota Denp:
8	Agus Wirajaya	Anggota DPRD Kota Denp:

Teknik Analisis

Teknik Analisis adalah gerak yang paling bagus di penelitian, karena bertujuan utama mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, penelitti memakai cara wawancara serta dokumentasi. Berikut dijelaskan secara rinci:

- a. Wawancara adalah cara memperoleh data dengan melempar pertanyaan langsung ke narasumber, dan jawabanjawabannya ditulis tangan. Peneliti menggunakan wawancara tersistematissdimana peneliti menggunakan cctatn pertanyaan wawancara.

- b. Dokumentasi, dimana kita memakai dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian ini. Sumber data tersebut seperti gambarfoto, video, lampiran, atau tulisan ilmiah yang dapat melengkapi penelitian ini.

Cara Analisis Data

Cara menganalisis data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Dalam tahap ini semua data yang telah diperoleh akan dikumpulkan kemudian dilakukan analisa oleh peneliti dengan dukungan teori yang digunakan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Info yang sudah didapatkan dari narasumber akan dianalisis dengan metode kualitatif yang melihat pelebagaan PSI dan hasil pemilu legislatif 2019 di Provinsi Bali. Aktivitas dalam analisis data terbagi tiga menurut Miles dan Huberman (2012:246) yaitu:

- a. Reduksi adalah cara pertama dalam menganalisis data. Reduksi data sendiri memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan diperoleh melalui observasi dan wawancara yang nantinya akan disederhanakan dengan cara meresume dengan pilihan pokok yang intinya serta mengklasifikasikan sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Penyajian data adalah suatu kegiatan menghidangkan data secara jelas dan sederhana agar mudah untuk memahami masalah yang diteliti baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Penyajian data dalam penelitian kualitatif menggunakan teks yang bersifat naratif.

Sebagaimana dalam proses reduksi data, penyajian data dalam penelitian ini tidaklah terlepas dari analisis data yang bersifat objektif.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan proses penyusunan inti sari dari data data awal yang didapat. Data ini masih bersifat sementara. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menemukan bukti bukti jelas dan apa adanya untuk menopang data awal. Sementara simpul kemudian di klarifikasi selama penelitian terjadi. Setelah itu dilakukan peninjauan ulang serta penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dilapangan maupun temuan data lain terkait dengan strategi pemberdayaan perempuan dalam suatu partai politik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik adalah kumpulan orang yang terorganisir dan memiliki kesamaan. Partai politik pada umumnya diartikan sebagai suatu organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku politik yang aktif dalam lingkungan masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatian pada peran soal kekuasaan pemerintah dan bersaing guna memperoleh dukungan rakyat untuk menempati kekuasaan politik. Partai politik dibentuk agar partai dapat mewujudkan harapan masyarakat dengan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyat.

Agar partai politik menjadi partai yang besar maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana partai tersebut menjalankan sistem yang sudah disusun oleh partai secara

baik dan berpola mengakar ke publik. Dari hal tersebut bisa dipastikan partai politik jika mau tetap eksis di dalam sistem politik maka harus tetap membuat nilai-nilainya di kenal oleh publik secara umum. Dari pengalaman melihat banyak partai yang tidak ada perubahan dalam mengakomodir politik sebagai tujuan untuk mensejahterakan rakyat secara umum dalam setiap pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan orang banyak. Masyarakat seakan-akan membutuhkan sesuatu yang baru terlebih lagi sebuah partai yang baru yang bisa membawa sebuah perubahan yang lain dari partai yang telah hadir sebelumnya. Fenomena yang terjadi di masyarakat memicu lahirnya sebuah ide atau gagasan yaitu dengan membentuk partai baru yang akan akan meramaikan pesta politik 2019. PSI lahir sebagai partai baru dengan jargon politik "Terbuka, Progresif, Itu Kita!". Tentunya ini adalah sebuah momentum yang gerakannya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Sebagai partai baru, langkah yang harus dilakukan oleh PSI agar menjadi sebuah partai yang besar adalah melakukan proses institusionalisasi partai. Institusionalisasi partai menyangkut perbaikan bangunan sistem internal partai dan pengelolaan secara eksternal. Pengelolaan secara eksternal menyangkut bagaimana partai bisa menjaga suara agar voters tetap memilih partai yang sama dalam pemilu berikutnya. Pengelolaan secara internal adalah Hal terpenting yang bisa menunjang proses pelembagaan partai yaitu profesionalisme dalam pengorganisasian dan manajemen partai.

PSI adalah partai baru dengan orang-orang baru telah menampilkan perkembangannya dari sisi pengurus dan anggota yang hadir di

setiap tingkatan wilayah. Sebagai partai baru dengan orang-orang baru ini melupakan performa awal yang cukup baik dan membuat penuls tertarik menganalisisnya.

Provinsi Bali adalah Provinsi yang tidak terlepas dari eksistensi PSI. Hadirnya PSI di Bali tidak terlepas dari bagaimana kemudian proses melembaganya DPW PSI Bali. Seperti pemaparan sebelumnya Institusionalisasi PSI sehingga PSI menjadi partai baru yang diperhitungkan pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Bali.

Jurnal ini berusaha menganalisa bentuk Institusionalisasi Partai Solidaritas Indonesia dalam konteks sebagai partai baru dengan orang-orang baru dari tahun 2015-2020. Terkait dengan hal itu, peneliti menentukan informan yang merupakan pengurus dari PSI Provinsi Bali dan calon legislatif yang terpilih dari PSI di Provinsi Bali. Dan informan lainnya adalah pengurus DPD PSI Denpasar yang mana calegnya berhasil terpilih pada pemilu legislatif Tahun 2019.

Pelembagaan sendiri didefinisikan sebagai sebuah pola yang stabil dan memiliki nilai tertentu dalam menjalankan program partai. Inilah yang dilakuakn oleh PSI sebagai partai baru dengan orang-orang baru, dimana PSI masih pada tingkatan melakukan sosialisasi agar dikenal oleh publik di Bali. Dan tahapan sosialisasi PSI Bali akan dibedah melalui cara pelembagaan dari pemahaman Randal dan Svasan. Dimana itu dilakukan dengan cukup baik dari tahun 2015 sampai 2020 yang menghasilkan anggota 3 anggota dewan di Bali melalui kontestasi politik pemilu 2019.

Hasil wawancara terkait dengan lembaga Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilu

Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali dengan memakai pendekatan dimensi-dimensi dari Randall dan Svasand dapat diperoleh temuan di lapangan sebagai berikut:

Dimensi Kesisteman (Systemnes) Partai Solidaritas Indonesia

Derajat sistem di pelebagaan parpol menjelaskan bahwa semua yang terjadi di dalam partai harus dilakukan sesuai dengan apa yang tertuang di anggaran dasar anggaran rumah tangga dari parpol tersebut. Segala mekanisme yang diputuskan haruslah mengikuti aturan yang sudah ada di partai politik, itulah yang menjadi poin dari dimensi/derajat kesisteman dari partai politik.

Parpol dalam fungsinya selalu melakukan publikasi, baik itu melalui media ataupun pendidikan politik di internal partai, tapi tetap saja akan berbeda jika dilihat oleh setiap subjek dan memiliki pemahaman yang berbeda dari setiap ideologi perjuangan partai. Seperti yang dijelaskan oleh Yasa Adi Susanto Ketua PSI Bali:

“Partai politik adalah instrumen untuk mengorganisasikan kekuasaan rakyat yang sangat beragam sehingga menjadi kekuatan efektif. Menurut Konstitusi, partai politik merupakan institusi utama bagi rekrutmen kepemimpinan di daerah dan pusat, baik di eksekutif maupun legislatif. Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR/DPRD, semuanya dinominasikan oleh partai. Hampir tidak ada gubernur, bupati, walikota tanpa nominasi partai. Partai paling bertanggung jawab atas kualitas kepemimpinan dan keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Partai-partai lama

dan baru secara umum mengandalkan seorang tokoh tunggal atau segelintir elite. Partai seperti milik keluarga. Rekrutmen kader dan pemimpin partai sangat bertumpu pada preferensi tokoh tunggal tersebut. Partai kurang mau terbuka dalam rekrutmen putra-putri terbaik bangsa. Tidak mengherankan kalau hasil rekrutmennya kemudian kurang memenuhi harapan. Harus ada terobosan dari situasi ini. Di satu sisi, partai-partai yang ada memerlukan dorongan yang kuat untuk memperbaiki organisasi maupun kinerjanya. Di sisi lain, kita memerlukan partai politik baru dengan visi, misi, program, manajemen, dan strategi yang berbeda dari kecenderungan partai-partai yang ada sekarang. Partai baru ini harus mampu menjawab aspirasi generasi baru yang dalam 10 atau 20 tahun ke depan akan menentukan politik dan kepemimpinan Indonesia. Partai baru ini juga harus menjadi contoh bahwa menjadi partai yang sukses haruslah dengan meninggalkan kebiasaan yang selama ini menjadi praktik umum di partai-partai yang sudah ada. Generasi baru ini cenderung membesar di daerah perkotaan seperti Denpasar yang sudah terbukti calon legislatif dari PSI bisa memiliki satu kursi di Provinsi dan 2 kursi di Kota dari daerah pemilihan Denpasar pada Pileg 2019, sejalan dengan semakin besarnya gelombang urbanisasi. Secara umum, generasi baru ini juga lebih terpelajar. Populasi urban dan terpelajar ini punya akses yang lebih kuat pada media massa. Mereka terekspos ke berbagai berita dan opini, dan cenderung kritis terhadap kondisi politik sekarang. Partai baru harus mampu merespon aspirasi generasi baru ini. Dan

menurut saya dan teman-teman di Bali PSI adalah jawabannya”

Dari pernyataan diatas, bagi PSI idealnya partai politik itu adalah partai kader yang memiliki haluan yang sejalan dengan arah perjuangan dari partai itu sendiri. Pada saat pemilu legislatif 2019 PSI Bali juga menjaring para calon anggota dewannya dari seleksi terbuka mencari caleg yang memiliki visi misi yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan PSI. Walaupun masih nampak ketidaksesuaian sistem kaderisasi internal partai sebagaimana yang tertulis di AD/ART, khususnya Bab V (sistem kaderisasi), tertulis dalam pasal dua belas bagian satu perihal model dan sumber bahwa PSI dimodelkan sebagai partai kader yang tersebar disayapsayap partai dengan fakta dilapangan sistem kaderisasi sayapsayap partai hampir tidak berjalan. Nah, sangat terang pengurus PSI Bali mayoritas berasal individu yang telah melalui jejaring kaderisasi dan individu calon legislatif yang maju pada Pileg tahun 2019 yang dianggap dewan pembina satu visi dengan PSI.

Dengan diterapkannya dimensi kesistemen partai yang sesuai dengan nilai-nilai partai, PSI Provinsi Bali membuktikan mampu memperoleh tiga kursi Anggota Dewan di wilayah Bali, dan yang menjadi poin utama adalah PSI merupakan partai baru, tetapi bisa memperoleh suara yang lumayan signifikan di Bali dibandingkan partai baru lainnya.

Dimensi Pengetahuan Publik Partai Solidaritas Indonesia

Dimensi pengetahuan publik (*reification*) ini menjelaskan tentang bagaimana partai membuat citra positif kepada masyarakat. Hal

ini, dapat juga dijelaskan seberapa mengenalnya masyarakat pada partai tersebut.

Menurut Emiliana DPRD Denpasar dari PSI pada saat wawancara:

“Secara praktis, dibanding dengan beberapa partai politik baru lainnya, terkecuali Perindo yang secara massif memanfaatkan fasilitas iklan di televisi, popularitas PSI terbilang relatif cukup baik. Hal ini misalnya tercermin dari temuan beberapa survei popularitas partai politik yang dilakukan setidaknya sejak tahun 2017. Namun, dalam perkembangannya menjelang Pileg 2019, berdasar pada temuan-temuan survei, peningkatan tingkat pengenalan PSI di tengah pemilih kurang menjanjikan. Hal ini terbukti kemudian pada hasil Pileg 2019 dimana PSI tidak mampu untuk lolos ambang batas raihan suara parlemen sebesar empat persen. Dulu saya juga menggunakan kampanye dari DPP PSI yaitu canvassing atau kampanye door to door, uniknya banyak cerita menarik saya pada saat kampanye mengenalkan PSI ke publik di Denpasar Selatan Dapil saya sendiri, dari awalnya ditolak warga sampai ada warga yang antusias mendengarkan program-program PSI”.



Gambar 4.2.1 Perolehan Suara Parnpol pada Pemilu Legislatif 2019

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan analisis peneliti pada hasil temuan penelitian yang dilakukan pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali untuk mengetahui efektifitas institusionalisasi pada pemilu legislatif tahun 2019 dan untuk menganalisis pelembagaan PSI Provinsi Bali. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif. Bertolak dari kerangka teoritik pelembagaan partai politik dari *Randall dan Svansand*, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang berfokus pada empat derajat lembaga. Hasil penelitian memperlihatkan derajat kesisteman (*systemnesss*) dalam proses pelembagaan di tubuh PSI Provinsi Bali yang masih jauh dari kata ideal. Faktor-faktor seperti penggunaan aturan disepakati ditetapkan dalam konstitusi parpol belum mampu diterjemahkan PSI Provinsi Bali secara sempurna dalam manajemenkeorganisasian. Di level derajat

identitas nilai (*value infusion*), PSI Provinsi Bali konsisten mengusung nilai yang menjadi landasan partai. Namun, secara praktis beberapa narasi yang diusung partai tidak terlalu mendatangkan insentif secara elektoral. Di level *decisional autonomy*, kondisi PSI Provinsi Bali yang hanya mengandalkan sumber pembiayaan partai dari sumber internal, kendati kondisi ini memberikan keleluasaan dan derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan, namun keterbatasan kemampuan keuangan berdampak pada efektifitas jalannya organisasi. Di level *value infusion*, narasi dan isu yang dibawa partai menjadikan mereka dekat dengan segmen pemilih dari kelompok minoritas, baik dari kelompok keagamaan maupun etnis. Di level keempat (*reification*), diferensiasi identitas yang dibawa partai nampak belum membumi di tengah publik Provinsi Bali secara umum. Namun, dengan terpilihnya 3 calon anggota legislatif dari PSI pada pemilu 2019 di Kota Denpasar membuat citra partai yang progresif memang disukai oleh masyarakat di perkotaan, dan ini setidaknya mesti dimaksimalkan oleh PSI Provinsi Bali untuk membangun citra positif ke publik di Bali untuk modal dipilih kembali di pemilu selanjutnya.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah dimana proses pelembagaan di PSI Bali masih menyesuaikan dengan dinamika yang ada di daerah. Sebagai parpol baru yang mau mensajikan gagasan untuk menantang pikiran dari partai politik lama, PSI Provinsi Bali sebenarnya belum menunjukkan performa yang terlalu menjanjikan.

Berbagai soal lembaga masih menjadi PR PSI Bali. Kuatnya lembaga bisa dilakukan dimulai dari hal-hal mendasar dalam manajemen parpol, contohnya pada saluran wewenang, bagi tugas, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan sumber daya keuangan partai, ketersediaan sekretariat permanen, pola kaderisasi yang sistematis, dan distribusi kader di kanal-kanal pemilih yang menjadi target utama PSI.

Untuk menjadi partai besar, seharusnya PSI Bali memperbaiki manajemen pengelolaan di internal partai agar bisa semua gagasan yang digaungkan bisa memiliki dasar yang kuat. Apalagi sekarang ini dinamika politik berjalan sangat dinamis dan perlu penguatan pada infrastruktur partai.

PSI Bali harus bisa membesarkan DNA yang digaungkan DPP PSI dengan tidak meninggalkan budaya Bali sehingga rakyat Bali dapat memahami DNA yang disebutkan itu. Jika tidak, PSI Bali tidak akan berkembang dihadapan partai-partai yang sudah kuat mengakar di masyarakat Bali, dan ini berdampak pada keeksistensi dari PSI di BALI.

Seharusnya dengan adanya tiga kader PSI Bali yang menjadi dewan perwakilan menjadikan PSI Bali bisa bertumbuh kedepannya untuk mengembangkan sayap-sayap partai di beberapa titik agar dapat berkontribusi menguatkan kelembagaan PSI Bali.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Firmanzah. (2018). *Mengelola Partai Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Diamond, Larry dan Gunther, Richard. "Political Parties and Democracy" A Journal of Democracy Book.

Efriza. (2012). *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.

Huntington, Samuel P. (2003). *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Masa*. Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kaelola, Akbar. (2009). *Kamus Istilah politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.

Mas'oeed, Mochtar dan MacAndrews, Colin. (2006.) *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mainwaring, Scott dan Mariano Torcal. *Party System Institutionalization and Party System Theory After the Third Wave of Democratization* dalam Katz, Richard. S dan William Crotty (editor). *Handbook of Party Politics*, (London: Sage, 2006).

Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. (1991). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Noor, Juliansyah. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Partai Solidaritas Indonesia. (2015). *ABC Partai Solidaritas Indonesia*. Jakarta: DPP PSI.

Randall, Vicky, dan Lars Svasand. (2002). "Party Institutionalization in New Democracies", dalam *Jurnal Party Politics*, Vol.8 No.1, pp. 5-29. London: Sage Publication.

Rudy, T May. (2003). *Pengantar Ilmu Politik "Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya"*. Bandung: Refika Aditama.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, D. (2009). *Iklan Politik TV, Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: LKis.
- Amalia, L. S.. (2013). Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 10 (2) 145-161.
- Anggara, Sahya. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Setia Pustaka.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bakry, La dan Andy Ramses M. (editor). (2009). *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: MIPI.
- Creswell, J., W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed; Cetakan ke-2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firman, Noor. (2017). Evaluasi Kondisi Kepartaian 14 Tahun Reformasi Dalam Perspektif Pelembagaan Sistem Kepartaian. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 38 (2), 221-250.
- Gaffar, Afan. (2000). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hanafy, Ridho Imawan. (2018). Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019, *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 15(2), 197-213.
- Hanafy, Ridho Imawan. (2018). Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019, *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 15(2), 197-213.
- Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yel University Press.
- Joseph A. (1984). On the Theory of Party Organization. *The Journal of Politics*, 46 (2, 369-400).
- Labolo, M dan Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lewis-Beck, Michael dan Chlarson, Kevin. (2002). Party, Ideology, and Institution in 1995 French Presidential Election. *The British. Journal of Political Science*, 32 (3), 489-512.
- Marsh, David., dan Stoker, Gary. (2011). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhasim, M. (2013). Kegagalan Modernisasi Partai Politik di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 10 (1), 17-28.
- Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism
- Randall, Vicky dan Lars, Svasand. (2002). *Party Institutionalisation in New Democracies*. *Party Politics*, 34 (1)
- Romli, Lili, dkk. (2008). *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Puskapol Fisip UI.
- Suryabrata, S. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Skripsi dan Jurnal:

- Hijriah Y. (2013). *Institusionalisasi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Lutfi. (2012). *Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang Pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan pada Pemilu 2009)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fajar Rizqy Mantra. 2017. *Institusionalisasi Partai Politik oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau*. *Jurnal FISIP* (4) No. 2.

Website atau Internet:

- Partai Solidaritas Indonesia. (2015). Diakses dari <https://psi.id/>, pada tanggal 24 September 2019, pukul 11.30 WITA.

SINDO NEWS. (2017). Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1212749/18/kerangka-institusionalisasi-parpol-1497211269>, pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 11.30 WITA.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. (2019). Diakses dari <https://bali.kpu.go.id/hasil-rekapitulasi-kpu-bali>, pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 11.30 WITA.

_____.(2019). *Institusionalisasi Parpol Menyambut Pemilu 2019*, diakses dari https://www.slideshare.net/doiha/institusionalisasi-partai-politik-menyambut-pemilu-2019?from_action=save, 20 Desember 2019.

Peraturan Organisasi:

PSI. (2014). AD/ART Partai Solidaritas Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 16 November 2014.

PSI. (2014). ABC PSI. Team DPP PSI: Jakarta